

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial yang dikelola oleh masyarakat dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Suatu organisasi nirlaba memperoleh sumber dayanya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa memupuk laba, dan tidak memiliki kepemilikan. Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit, klinik publik, organisasi politik, organisasi masyarakat, atau serikat buruh. Dalam organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat peribadatan misalnya gereja, masjid, pura, dan sebagainya (Endang, 2017).

Salah satu bentuk organisasi nirlaba adalah organisasi gereja katolik, atau yang lebih dikenal dengan Paroki. Paroki menurut KHK 1983 dan ajaran Konsili Vatikan II berasal dari kata paroikeo yang artinya tinggal berdekatan. Kata ini dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan di mana orang hidup bersama saling berdekatan dalam suatu wilayah, lingkungan dan distrik tertentu. Kata ini digunakan juga untuk kelompok provinsi, yang dipimpin oleh seorang gubernur atau magister yang disebut dengan parochus atau copiarus. Istilah ini juga berkembang pada abad IV dalam jabatan Gereja untuk wilayah

yang lebih besar di bawah pimpinan seorang Uskup dengan nama dioses. Kitab Hukum Kanonik 1983, kanon 515, menjelaskan pengertian paroki sebagai berikut: Paroki adalah jemaat tertentu kaum beriman kristiani yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular dan yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup diosesan, dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri.

Paroki-paroki di Keuskupan Agung Semarang dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan umat dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan suatu imbalan apapun dari Paroki tersebut. Walaupun tidak mengharapkan imbalan apapun dari Paroki, akan tetapi para penyumbang dan para umat membutuhkan informasi mengenai kondisi dan keberadaan dari Paroki tentang dana yang disumbangkannya. Berdasarkan dari sudut badan hukumnya, Paroki-paroki di Keuskupan Agung Semarang merupakan yayasan Gerejawi karena didirikan berdasarkan *Stichtingbrief kerk en armbestuur* / Surat Yayasan Gerejawi atau *Oprichtingbrief kerk en armbestuur* / Surat Pendirian Gereja, yaitu atas nama Pengurus Gereja dan Papa Miskin (PGPM). Karena Paroki merupakan organisasi nirlaba dan juga merupakan yayasan Gerejawi, maka Paroki termasuk organisasi sektor publik (Mahsun dkk, 2007).

Sebagai bentuk dari organisasi nirlaba Paroki juga mempunyai kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan. Keuangan Paroki dalam hal ini adalah uang dan harta benda Paroki yang berasal dari kolekte, amplop persembahan, sumbangan dan usaha-usaha lain yang dijalankan sesuai peraturan Gereja yang berlaku. Dimana dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Paroki berada langsung dan personal berada ditangan Pastor Kepala Paroki, serta pengelolaannya dijalankan oleh Pastor Kepala Paroki dengan dibantu oleh Bendahara Paroki.

Pengelolaan keuangan paroki diharapkan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan Akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam suatu organisasi, sistem pengelolaan dan pelaporan keuangannya harus disajikan dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Untuk itu segala sesuatu yang dikelola didalam paroki, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan observasi, informasi yang didapat penulis mengenai total pendapatan dari kolekte mingguan di Paroki Maria Marganingsih Kalasan sudah menyentuh angka dua digit. Pendapatan ini belum ditambah dengan

pendapatan dari sumbangan dan usaha-usaha lain yang dijalankan sesuai aturan gereja. Mengingat pendapatan yang diperoleh Paroki Maria Marganingsih Kalasan ini cukup besar, maka diperlukan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaannya. Jadi sangat perlu diperhatikan sistem pengelolaannya melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi untuk menjamin tidak adanya kecurangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan melakukan analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi nirlaba pada Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan. Peneliti akan berfokus pada pengelolaan kegiatan dan keuangan yang berkaitan dengan sumber dana gereja yang diperoleh kolekte dan persembahan umat di Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan. Adapun alasan khusus peneliti memilih gereja katolik Maria Marganingsih Kalasan karena memiliki Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki yang ditetapkan Keuskupan Semarang dalam menerapkan tatakelola keuangan gereja yang dapat disesuaikan dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi. Analisis ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan dan keuangan yang baik dan benar menurut norma-norma yang telah disepakati uskup. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi paroki guna menghindari penyalahgunaan dana dari kolekte dan persembahan dari umat sehingga dapat menjaga kepercayaan

umat dan mempertahankan citra serta nama baik organisasi gereja katolik dengan memahami penerapan akuntabilitas dan transparansi yang baik.

1.2 Perumusan Masalah

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk tanggungjawab dari seluruh organisasi, termasuk organisasi nirlaba. Terdapat beberapa dimensi akuntabilitas yang harus diwujudkan oleh organisasi nirlaba, termasuk Gereja. Dalam organisasi keagamaan, akuntabilitas memiliki makna yang lebih mendalam karena hubungan dengan manusia kepada Tuhannya. Selain itu, terdapat beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh Gereja. Dimensi tersebut adalah akuntabilitas spiritual, hokum, program, proses dan keuangan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pada Gereja Katolik Paroki Maria Marganingsih Kalasan?
2. Bagaimana penilaian umat terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Gereja Katolik Paroki Maria Marganingsih Kalasan?

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada :

1. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pada penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran kas.
2. Formulir serta dokumen yang digunakan seperti yang telah dianjurkan dalam PPAP.
3. Standar aturan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki (PPAP)
4. Kendala atau hambatan yang dihadapi adalah hambatan yang dialami oleh para pengelola keuangan antara lain pastor Paroki, bendahara, dan sekretaris paroki, dimana mereka yang mempunyai tanggungjawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Paroki.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pada Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan. Penelitian ini kiranya dapat memberikan pemahaman, dan pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi keagamaan untuk menghindari tindakan penyelewengan keuangan maupun penggelapan asset dan berguna

untuk keberhasilan organisasi dalam menjaga kepercayaan umat, kepuasan, pencegahan korupsi serta menghindari terjadinya penodaan nama baik organisasi keagamaan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab.

1.4.2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Bagi Gereja**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan dalam menerapkan akuntabilitas yang baik, khususnya mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan dan harta benda gereja.

2. **Bagi Umat**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi umat yang ingin mengetahui penerapan akuntabilitas pada Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan.

3. **Bagi Akademisi**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi peneliti untuk menjalankan penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

Bab 1 Pendahuluan

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang dijadikan dasar untuk penelitian, pembahasan serta sebagai dasar dan acuan untuk mengolah data. Bab ini berisi mengenai uraian teoritis laporan keuangan, PTKAP, uraian teoritis akuntabilitas, jenis - jenis akuntabilitas, uraian teoritis transparansi, dimensi transparansi, karakteristik transparansi dan tabel penelitian terdahulu.

Bab 3 Metode Penelitian dan Gambaran Umum Gereja

Memuat metode penelitian, sejarah Paroki, lokasi, struktur organisasi Dewan Paroki, pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi keuangan Paroki Maria Marganingsih Kalasan.

Bab 4 Analisa Data dan Pembahasan

Bab ini memuat deskripsi data, analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan serta pembahasan.

Bab 5 Penutup

Pada bab terakhir ini akan disajikan dari hasil analisis serta pembahasan, keterbatasan dalam penelitian dan saran yang berguna bagi organisasi, maupun penelitian selanjutnya.

